

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil PT Nindya Karya

2.1.1 Susunan Pengurus

Kepengurusan PT Nindya Karya diatur sesuai hasil pada Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Di Luar RUPS yang tertuang dalam SK-26/MBU/01/2020 dan Kep-PS 03/PPA/0120 tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengalihan Penugasan Direksi Utama serta Direksi Pemasaran dan Pengembangan Perusahaan PT Nindya Karya (Persero). Selain itu, diatur pula mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris PT Nindya Karya berdasarkan SK-308/MBU/12/2018 dan SK-78/PPA/1218 tanggal 26 Desember 2018 jo. SK-205/MBU/09/2019 dan KEP-PS 06/PPA/0919 tanggal 13 September 2019 jo. SK-6/MBU/01/2020 dan Nomor KEP-PS 01/PPA/0120 tanggal 6 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris PT Nindya Karya. Sehingga sampai penelitian ini dilakukan, susunan kepengurusan PT Nindya Karya (Persero) adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Haidar A. Karim
Direktur Keuangan dan SDM	: Sri Haryanto
Direktur Produksi dan HSE	: Firmansyah
Direktur Pemasaran dan Pengembangan	: Moeharmein Zein Chaniago

Susunan tersebut merupakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham yang menggantikan posisi Indradjaja Manopol sebagai Direktur Utama oleh Haidar A. Karim yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Perusahaan serta mengangkat Moeharmein Zein Chaniago sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Perusahaan menggantikan Haidar A. Karim.

2.1.2 Visi dan Misi

Sebagai salah satu entitas bisnis, tentunya Nindya Karya memiliki rencana capaian jangka pendek maupun panjang dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Tujuan tersebut dapat tercermin dalam visi dan misi perusahaan. Visi Nindya Karya yakni menjadi perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi berbasis engineering yang terpercaya, terkemuka dan berkelanjutan.

Nindya Karya juga memiliki misi untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholders secara berkelanjutan berbasis excellence engineering dengan inovasi serta human capital yang unggul dan berakhlak serta mengembangkan industri konstruksi dan investasi yang berstandar global dan berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, kesehatan dan keselamatan kerja serta kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.3 Struktur Permodalan

PT Nindya Karya memiliki jumlah permodalan dasar di tahun 2020 sebesar Rp. 5.240.937.739.300 (lima triliun dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), dengan komposisi 71,03% utang bersih dan 29,97% ekuitas. Jumlah utang bersih yang banyak digunakan dalam komposisi permodalan tersebut terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya sejak data komposisi permodalan terakhir yang penulis dapat, yakni pada tahun 2017 sebesar 67,52% utang bersih dan 32,48% ekuitas. Sehingga dapat diperoleh struktur permodalan sejak tahun 2017 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Modal 2017-2020

Kompos isi	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Ekuitas	1.257.187.029. 200	1.512.046.092. 925	1.686.637.820. 884	1.518.075.058. 800
Utang bersih	2.613.548.192. 970.	3.640.665.289. 480	3.881.621.872. 982	3.722.862.680. 500

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT Nindya Karya

2.1.4 Komposisi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang penting dalam menggerakkan operasional perusahaan. Nindya Karya sendiri memiliki jumlah karyawan yang mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Di akhir tahun 2020, jumlah karyawan perusahaan diketahui sebanyak 666 karyawan. Secara rinci

kenaikan dan penurunan jumlah karyawan Nindya Karya selama 5 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

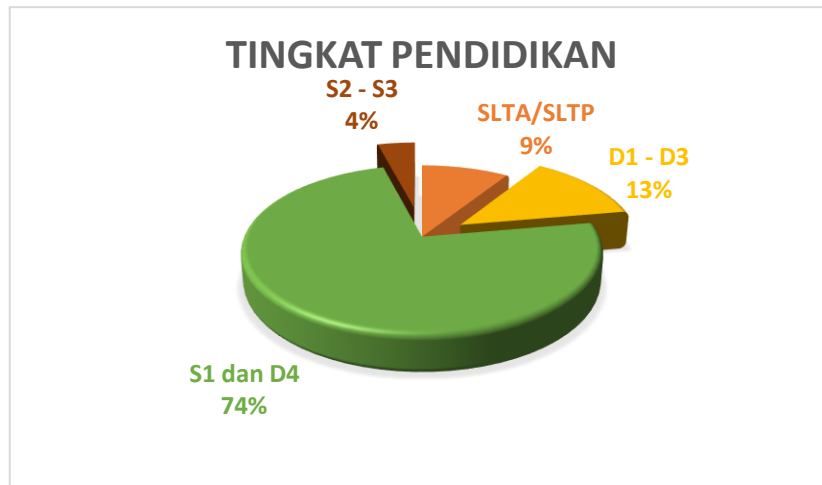
Tabel 2. Jumlah Karyawan 2016-2020

KETERANGAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Karyawan 5 tahun terakhir	841	935	996	979	666

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT Nindya Karya

Dari jumlah 666 karyawan perusahaan, sebanyak 55% karyawan perusahaan merupakan pegawai tetap dan 45% lainnya dikategorikan sebagai pegawai kontrak atau tidak tetap. Secara umum, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai di Nindya Karya tergolong cukup tinggi. Rekrutmen pegawai sebesar 73% lulusan S1 mendominasi gelar pendidikan yang dimiliki oleh pegawai Nindya Karya dan 9% lulusan SLTA/SLTP sebagai lulusan terendah di perusahaan Nindya Karya. Grafik sebaran tingkat pendidikan pada PT Nindya Karya (Persero) adalah sebagai berikut:

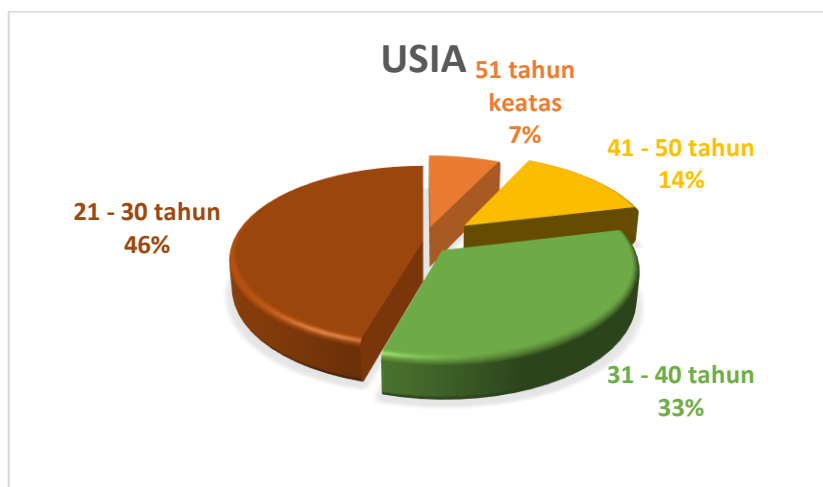
Gambar 1. Grafik Tingkat Pendidikan Karyawan



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT Nindya Karya

Selain melihat kompetensi SDM melalui komposisi tingkat pendidikan yang dimiliki. Komposisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui sebaran usia karyawan pada Nindya Karya. Sebaran ini dapat dijadikan standar bagi manajemen untuk mengetahui pemetaan dalam rangka pengambilan keputusan oleh Manajemen SDM. Secara umum, data tersebut tersaji pada grafik berikut:

Gambar 2. Grafik Usia Karyawan



Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT Nindya Karya

2.2 Sejarah PT Nindya Karya

PT Nindya Karya (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang konstruksi. Secara spesifik, Nindya Karya menjalankan bisnis operasinya sebagai kontraktor umum (*General Contractor*), *Engineering Procurement Construction* (EPC), dan Investasi (*Investment*). Nindya Karya sebagai perusahaan yang cukup lama menapakan jejak karirnya pada industri konstruksi terhitung telah menjalankan bisnis usahanya sejak pendiriannya sebagai perusahaan yang didirikan Belanda pada tahun 1877 dengan nama *NV Nederlands Aannemings Maatschappij* (NEDAM). Hingga akhirnya pada tahun 1958 diakuisisi sebagai perusahaan milik Republik Indonesia dan disahkan sebagai Perusahaan Negara (PN) kala itu pada tahun 1961 yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Negara (PN) Nindya Karya.

Sejak awal pembentukannya, perusahaan berhasil membangun proyek-proyek dalam bisnis operasinya. Beberapa proyek konstruksi ternama yang telah dibangun diantaranya, Stadion Patriot Candrabhaga, *Fly Over* Kuningan dan Pancoran, dan Stadion Gelora Bung Karno yang menjadi salah satu stadion terbesar di dunia. Kesuksesan tersebut memang telah didukung pengalaman perusahaan Nindya Karya yang telah berkiprah di dunia kontaktor selama lebih dari 60 tahun sejak awal peresmiannya sebagai Perusahaan Negara Republik Indonesia.

Namun setelah 48 tahun sejak akuisisi perusahaan sebagai miliki negara, Nindya Karya justru tersandung kasus korupsi yang salah satunya melibatkan

Kepala Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, pada tahun anggaran 2006 hingga 2011. Bahkan Nindya Karya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada keadaan terpuruk seperti inilah perusahaan membutuhkan penanganan langsung oleh pemerintah sebagai pemberi modal terbesar. Penanganan secara khusus akhirnya diserahkan kepada PT PPA selaku pemegang modal terbesar sekaligus menjalankan fungsi pengawasan internal perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara khusus yang dilakukan oleh tim detikFinance kepada Direktur Utama Nindya Karya tahun 2013, I Gusti Ngurah Putra, diperoleh informasi bahwa Nindya Karya saat itu harus menghadapi beberapa masalah, khususnya pada bagian sumber daya manusia (SDM) dan sistem operasional perusahaan yang tidak efektif (detikfinance, 2013). Selain itu, perusahaan juga memiliki jumlah utang cukup besar. Tahun 2013, perusahaan berhasil merestrukturisasi sebagian utangnya sebesar 700 miliar rupiah yang didalamnya meliputi utang jangka pendek serta pembayaran gaji karyawan yang menunggak selama beberapa tahun sebelumnya.

Setelah dilakukannya restrukturisasi saat itu perusahaan mampu terlepas dari ancaman pailit oleh para kreditur dan beroperasi secara normal. Hingga kini perusahaan Nindya Karya telah dipercaya menjalankan beberapa proyek-proyek besar seperti pengerjaan sistem pengairan dan waduk, bangunan industri dan EPC, gedung, bandara, dermaga, rumah sakit, hotel dan perumahan, jalan raya dan tol, bangunan pendidikan, serta berbagai bangunan komersial lainnya. Beberapa jejak

karir tersebut menandakan perusahaan menjalankan lima pilar bisnis utama yaitu pada bidang Kontruksi, Energi, Manufaktur, Properti dan Badan Usaha Jalan Tol.

Tujuan jangka panjang Nindya Karya tertera pada visinya, yaitu menjadi perusahaan global di bidang konstruksi dan investasi berbasis *engineering* yang terpercaya, terkemuka dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan turut melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan kontruksi yang cukup ternama dari Turki, Uçgen Proje, dalam rangka pembangunan salah satu Rumah Sakit di Ukraina serta mendapatkan sertifikasi tambahan terkait keamanan informasi dan teknologi informasi. Kerjasama dan penambahan sertifikasi tersebut semakin memperkuat portofolio bisnis Nindya Karya, baik pada bidang konstruksi dan investasi di level global.

2.3 Landasan Teori

Pembangunan infrastruktur saat ini menjadi kebutuhan yang diperlukan bagi setiap negara di dunia. Indonesia yang saat ini masih menjadi negara yang terus bertumbuh tidak luput dari kebutuhan pembangunan tersebut. Nindya Karya sebagai salah satu perusahaan BUMN yang sempat dilakukan restrukturisasi menjadi perusahaan konstruksi yang dinilai cukup sukses pada era pembangunan infrastruktur tersebut.

Restrukturisasi dilakukan atas dasar kebutuhan perusahaan untuk tetap dapat menghasilkan laba yang tinggi. Menurut (As'ari & dkk, 2019), restrukturisasi diklasifikasikan ke dalam beberapa kebutuhan perbaikan, antara lain operasional, keuangan, manajerial dan portofolio. Namun, jenis restrukturisasi perlu disesuaikan

dengan kebutuhan atau masalah yang perlu dibenahi pada perusahaan yang menjadi objek restrukturisasi tersebut.

Restrukturisasi pada Nindya Karya menurut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Nindya Karya, diawali dengan penerbitan saham baru untuk dipegang sementara oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Selanjutnya, PPA melakukan skema dana talangan terhadap seluruh kewajiban yang tidak mampu dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, restrukturisasi internal perusahaan mencakup perbaikan pada keuangan, operasional, organisasi atau manajemen, prosedur, dan sistem. Khusus pada Nindya Karya, restrukturisasi dilakukan dengan simplifikasi sistem, restrukturisasi keuangan, dan pengaturan kembali di bidang SDM dan organisasi.

Nindya Karya sebagai perusahaan BUMN merupakan salah satu dari banyak perusahaan yang berperan dalam penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehingga laba yang tinggi akan mendorong peningkatan kesejahteraan *stakeholder*.

2.3.1 Konsepsi KND dan BUMN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam memiliki banyak potensi yang tersimpan untuk dimanfaatkan. Beberapa potensi tersebut tentu sangat dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara sumber daya tersebut, terdapat beberapa kekayaan alam yang sangat dibutuhkan

oleh orang banyak. Sehingga jika tidak diberikan batasan, maka dikhawatirkan terjadi pasar monopolistik.

Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea keempat, diamanatkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sehingga hajat hidup orang banyak perlu dilakukan pengelolaan secara bijak demi pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, pemerintah membentuk sebuah konsep yang disebut sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu kekayaan negara yang modalnya diperoleh dari APBN dan dikelola oleh BUMN sebagai penyertaan modal negara dengan pengelolaan yang mendasarkan pada *Good Corporate Governance*.

Sejalan dengan definisi tersebut, dikenal juga BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2003, dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian maupun seluruh ekuitasnya dikuasai negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan didirikannya BUMN merupakan wujud upaya pemerintah dalam menambah sumber penggerak ekonomi nasional secara umum dan sebagai sumber pendapatan negara.

Meskipun secara konseptual, perusahaan BUMN terpisah pengelolaannya dari sistem APBN, namun kekayaan negara dipisahkan yang dalam hal ini merupakan perusahaan BUMN tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan presiden dalam kebijakan fiskal dan kepemilikan

kekayaan negara dipisahkan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam pengelolaannya, Menteri Keuangan dalam Undang-Undang No.19 tahun 2003 jo. PP No. 41 tahun 2003, melimpahkan tugas, kedudukan, dan wewenang Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri BUMN.

Pengelolaan yang diserahkan kepada pimpinan direksi perusahaan BUMN tak jarang menghasilkan pendapatan yang tidak mampu dioptimalisasi dengan baik, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara yang merupakan modal awal pendirian perusahaan BUMN. Sehingga analisis yang komprehensif dianjurkan untuk dilakukan terhadap kemampuan perusahaan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan yang ditinjau dari aspek keuangan perusahaan. Selain itu, porsi kepemilikan yang besar oleh negara akan sangat merugikan bagi postur APBN jika tidak ada peran aktif dari pemerintah untuk memperbaiki keadaan tersebut.

2.3.2 Konsep Restrukturisasi

Restrukturisasi sudah sangat umum dikenal dalam dunia bisnis. Secara definisi, restrukturisasi diartikan sebagai upaya yang dilakukan sebagai bentuk penyehatan kembali guna perbaikan keadaan internal yang merupakan upaya peningkatan kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan restrukturisasi yang paling utama adalah mengatasi permasalahan yang terjadi pada komponen tertentu perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Komponen bisnis yang diperbaiki berada

pada lingkup yang terkait dengan struktur permodalan, penataan ulang manajemen, portofolio perusahaan, sistem tata kelola, maupun sumber daya manusia.

Dengan demikian, menurut penelitian sebelumnya (Mardiyanto, 2009), restrukturisasi pada korporasi akan dilakukan melalui serangkaian langkah dalam rangka penataan ulang struktur organisasi akibat adanya upaya ekspansi dan kontraksi perusahaan. Hal ini sebagai bentuk maksimalisasi perluasan pangsa pasar dan perolehan laba yang dilakukan dengan simplifikasi suatu sistem yang dinilai kurang efektif dan efisien.

Restrukturisasi menurut Bernardin dan Russel (1998) dalam jurnal (Leonardo & Eddy, 2013), dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara seperti *downsizing, delayering, decentralizing, reorganization, cost reduction strategy, IT innovation, competency measurement, dan performance related pay*. Sebelum melakukan metode tersebut, terdapat tahap analisis awal dalam dalam rangka identifikasi masalah perusahaan untuk mengetahui metode yang tepat. Langkah awal dalam menjalani proses restrukturisasi yaitu *Due Diligence* dan Analisis Prospek dengan beberapa rincian audit.

Menurut Novel (2002) dalam jurnal (Leonardo & Eddy, 2013), proses restrukturisasi dibagi menjadi tiga tahapan. Tahap awal sebagai langkah identifikasi awal dilakukan proses audit. Tahap mengaudit tersebut diantaranya mencakup kinerja dan sistem pemasaran, Sistem Logistik dan Operasi, Organisasi dan Manajemen, serta Sistem Akuntansi dan Keuangan. Setelahnya, restrukturisasi dilanjutkan pada tahap pengembangan program jangka pendek dan jangka panjang

yang dimaksudkan sebagai penyusunan strategi peningkatan laba serta menciptakan arus kas yang tinggi penerimaan dengan biaya rendah. Hingga tahap akhir masuk kepada implementasi perencanaan terhadap perusahaan tersebut melalui pembaruan kapasitas perencanaan strategik, kapasitas kepemimpinan dan manajerial, dan ketentuan prosedural.

Restrukturisasi sendiri secara teori dan tujuan akan menghasilkan kinerja keuangan yang positif bagi kinerja keuangan perusahaan. Namun, pada beberapa kasus, ditemukan restrukturisasi yang tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan teori tersebut. Analisis mengenai kinerja keuangan agaknya perlu dilakukan terhadap perusahaan yang selesai dari program pemulihan kondisi perusahaan pasca restrukturisasi agar secara jelas dapat diketahui bagaimana dan besaran pengaruh yang diperoleh pada perusahaan BUMN tersebut.

2.3.3 Konsepsi Kinerja Keuangan

Menurut Rivai & Basri (2005), kinerja diartikan sebagai tingkat kesuksesan pencapaian terget seseorang secara menyeluruh dalam periode tertentu dalam menjalankan suatu pekerjaan dibandingkan dengan hasil pekerjaan sebelumnya maupun sasaran kinerja yang telah direncanakan dan diseapakati bersama sebelumnya. Salah satu bentuk penyederhanaan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan adalah menggunakan rasio keuangan.

Menurut (Hery, 2015), rasio keuangan adalah alat pengukur dalam laporan keuangan dalam rangka melakukan penilaian kinerja dan kondisi keuangan dengan metode perbandingan suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang

memiliki korelasi. Rasio keuangan mempermudah pihak eksternal dalam memahami kondisi perusahaan daripada hanya mengandalkan data nominal laporan tahunan. Selain itu, rasio keuangan dapat memberikan gambaran keadaan suatu perusahaan pada periode tertentu apabila data pada rasio tersebut dikomparasikan dengan data rasio pembanding yang digunakan sebagai standar. Pada penelitian ini, terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kesanggupan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo sehingga mencerminkan tingkat kemudahan pencairan dana pada perusahaan. Semakin tinggi rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik pula perusahaan tersebut dalam melunasi utang jangka pendeknya. Dalam rasio ini penulis menggunakan salah satu jenis rasio likuiditas sebagai variabel independen, yakni rasio lancar (*Current Ratio*).

Rasio lancar mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran kewajiban maupun utang lancarnya dengan menggunakan aktiva yang tersedia tanpa mempertimbangkan nilai persediaannya. Sebagaimana teori dasar dalam rasio likuiditas, semakin besar rasio lancar, maka akan semakin baik perusahaan membayar seluruh kewajiban dan utang jangka pendeknya. Dalam hal ini, dapat dikatakan rasio 1:1 atau 100% merupakan standar bahwa perusahaan

dikatakan seluruh aktiva lancar dapat menutupi seluruh utang lancar dan perusahaan dikatakan sehat. Adapun rumus perhitungan rasio lancar adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Hutang Lancar} \times 100\%$$

b. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimilikinya. Semakin besar nilai rasio aktivitas yang dimiliki perusahaan, maka semakin baik pula efektivitas penggunaan aset pada perusahaan tersebut. Dalam analisis rasio keuangan, rasio aktivitas yang rendah menandakan semakin besarnya kelebihan dana yang mengendap dalam aktiva sehingga dikatakan aktiva perusahaan kurang produktif. Terdapat satu jenis rasio aktivitas yang digunakan sebagai variabel independen pada penelitian ini yaitu Perputaran Aktiva Total (*Total Asset Turnover*).

Total Asset Turnover dalam analisis laporan keuangan digunakan untuk mengukur seberapa besar efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan sejumlah penjualan dari total asetnya dengan mempertimbangkan total aset rata-rata dan penjualan bersih perusahaan. Dalam hal ini, nilai yang semakin besar pada *Total Asset Turnover* jika dibandingkan dengan industri yang sejenis, menandakan perusahaan berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Adapun perhitungan *Total Asset Turnover* dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{Total Asset Turn Over} = \text{Penjualan} : \text{Rata - rata total aset}$$

c. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pada rasio ini juga, analisator dapat mengetahui tingkat keberlangsungan hidup (*going concern*) perusahaan karena aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan perolehan profit yang diraih perusahaan. Dalam hal ini, penulis menggunakan salah satu bentuk pengukuran pada rasio profitabilitas sebagai variabel dependen, yaitu Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*).

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih. Rasio ini diperoleh dengan mengukur persentase dari penjualan yang telah dikurangi pengeluaran dan biaya serta bunga dan pajak. Adapun rasio *Net Profit Margin* dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$\text{Margin Laba Bersih} = \text{Laba Bersih} : \text{Penjualan Bersih}$$

2.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari berbagai referensi jurnal ilmiah, restrukturisasi dapat berdampak positif pada perusahaan maupun sebaliknya. Restrukturisasi perusahaan sendiri sejatinya menjadi opsi yang dapat dilakukan pihak manajerial untuk dapat mengembalikan operasional bisnis perusahaan dengan melakukan penataan kembali sistem tata kelola perusahaan. Namun, berdasarkan hasil temuan peneliti lain menunjukkan bahwa restrukturisasi tidak selamanya memberikan hasil yang positif bagi kinerja keuangan perusahaan.

Fenomena *research gap* tersebut ditemukan dalam beberapa penelitian, saat restrukturisasi yang seharusnya menjadi sarana perbaikan justru memiliki korelasi

yang negatif terhadap pemulihan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Salim & Yadav, 2012) serta (Riani & Apriadi N, 2020), kinerja perusahaan setelah dilakukan restrukturisasi menunjukkan ketidak sesuaian dengan tujuan restrukturisasi yang secara teori sebagai kebutuhan dalam penyehatan perusahaan.

Fenomena saat hendak melakukan upaya restrukturisasi utang ini bukan tanpa sebab. Menurut hasil penelitian Kaur dan Srivastava (2017) dalam (Rudiana & Venusita, 2017) dikatakan bahwa terjadi penyimpangan maksud dan tujuan yang diharapkan oleh salah satu pihak yang secara etika dan normatif dapat merugikan pihak lain (*moral hazard*). Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pada beberapa kasus restrukturisasi utang tersebut, Debitur hanya menjadikannya sebagai bentuk penghindaran dan penundaan dari pembayaran utang dan mengurangi besaran kredit dengan alibi bahwa perusahaan sedang berstatus kurang lancar tanpa melakukan perbaikan kinerja yang secara nyata.

Keberhasilan restrukturisasi dapat diketahui melalui beberapa komponen kinerja laporan keuangan perusahaan selama beberapa tahun. Melalui tingkat kemajuan pada rasio keuangan tahunan, analisis dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian perusahaan terhadap aset yang dimiliki dari tahun ke tahun. Tindakan restrukturisasi cenderung mempengaruhi kinerja perusahaan, bentuk restrukturisasi berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Srivastava, & Mushtaq (2011) serta Riany dkk., (2012) menunjukkan bahwa kebutuhan restrukturisasi menjadi sangat penting karena menghasilkan terjadinya peningkatan pendapatan, tingkat pengembalian atas aset, dan margin laba. Sehingga pernyataan tersebut

secara langsung turut menyatakan bahwa restrukturisasi berimplikasi langsung secara positif bagi kinerja keuangan.

2.5 Ikhtisar Kinerja Keuangan PT Nindya Karya Tahun 2010 s.d. 2020

Berkaitan dengan konsep penulisan karya tulis ini, penulis melakukan analisis terhadap kinerja keuangan PT Nindya Karya (Persero) selama masa operasional pemulihan kinerjanya sejak 2010 hingga 2020. Kebijakan restrukturisasi tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengutus PT PPA sebagai pengelola aset milik PT Nindya Karya untuk dilakukan penyehatan perusahaan.

Secara umum, sejak dilakukannya restrukturisasi pada PT Nindya Karya (Persero) peningkatan dan penurunan tren kinerja keuangan sulit diprediksi. Namun jika dilakukan tinjauan lebih mendalam pada setiap variabel, Nindya Karya memiliki rata-rata kenaikan pada 2010 hingga 2020 pada variabel *Total Asset Turnover* dan *Net Profit Margin*. Sedangkan pada sisi variabel *Current ratio* cenderung mengalami penurunan secara rata-rata. Hal ini dapat dilihat pada tabel data penelitian ketiga variabel tersebut yang menjadi fokus utama penulis dalam proses analisis data.

Tabel 3. Data Rasio Keuangan 2010-2020

	<i>Current ratio</i>	<i>Total Asset Turnover</i>	<i>Net Profit Margin</i>
2010	-112,74	102,23	-8,40
2011	247,86	67,59	1,69
2012	127,90	93,78	1,99
2013	118,26	88,03	2,31
2014	140,78	75,10	2,26
2015	112,05	103,28	1,83
2016	55,63	124,02	3,81
2017	59,03	138,89	4,16
2018	49,31	113,37	4,37
2019	44,28	98,03	3,73
2020	68,19	69,51	1,18

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT Nindya Karya

Selain tinjauan data rasio-rasio diatas, penulis juga melakukan tinjauan sederhana terhadap laporan posisi keuangan konsolidasi untuk sedikit menganalisa lebih jauh komposisi aset dan liabilitas yang juga berkaitan erat dengan *Current Ratio* dan *Total Asset Turnover*. Hasilnya diperoleh bahwa aset dan liabilitas perusahaan tetap mengalami peningkatan secara berkelanjutan setelah restrukturisasi dilaksanakan.

Tabel 4. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Aset lancar	594.234	610.550	610,976	4.221.245
Investasi pada ventura bersama	201.486	201.486	206.733	242.398
Aset tetap	4.729.879	5.091.001	6.076.322	561.071
Aset tidak tetap	155.287	356.401	428.233	462.103
Jumlah aset	4.729.879	5.691.001	6.076.322	5.486.817
Liabilitas jangka pendek	2.926.055	3.667.131	4.023.379	3.203.168
Liabilitas jangka panjang	546.636	511.825	366.306	765.574
Jumlah liabilitas	3.472.691	4.178.956	4.389.685	3.968.742
Jumlah ekuitas	1.257.187	1.512.046	1.686.637	1.518.074

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan PT Nindya Karya

Sejak beberapa tahun masa restrukturisasi dilaksanakan oleh PT PPA pada PT Nindya Karya, perusahaan terus mengalami kemajuan yang cukup baik pada jumlah aset secara mayoritas pada jumlah aset tahun berjalan, yakni pada kisaran 55% peningkatan. Tren yang sama juga ditemukan pada jumlah liabilitas didominasi peningkatan pada 2017 hingga 2019, meskipun hal yang sama berupa penurunan terjadi di tahun 2020, sehingga rata-rata kenaikan liabilitas perusahaan mengalami peningkatan pada kisaran 43%.

Berdasarkan data pada tabel tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan mampu untuk terus meningkat dan berada dalam kondisi yang baik. Setiap variabel ada aset dan liabilitas umumnya mengalami peningkatan, kecuali pada liabilitas jangka panjang yang terus menurun hingga 2020. Hal tersebut dinilai baik bagi perusahaan lantaran berkurangnya beban yang dimiliki perusahaan, berupa utang, hipotek, pendapatan yang diagunkan, dan sebagainya.

Namun bentuk penurunan dan peningkatan pada data-data diatas belum mencerminkan hasil asumsi. Dugaan mengenai data dan interpretasi tersebut memerlukan penelitian lebih mendalam terkait variabel yang terkait dengannya, seperti *Current ratio* dan *Total Asset Turnover* yang akan dilakukan proses analisis pada karya tulis ini.